

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pembangunan PBB (UNDP) menyebut kenaikan inflasi global telah mendorong peningkatan jumlah orang miskin di negara-negara berkembang mencapai 71 juta orang hanya dalam tiga bulan sejak Maret 2022. Kenaikan inflasi yang direspons pengetatan moneter berpotensi memperburuk keadaan (Said, 2022). Salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat ekonomi rendah berada di kawasan Asia Tenggara yaitu negara Myanmar, Menurut data Bank Dunia, kemiskinan di Myanmar turun dari 48 % menjadi 25 % antara 2005 dan 2017. Kemiskinan di Myanmar diprediksi akan naik pada 2022 sebagai dampak dari kudeta militer dan Covid-19. Kudeta di Myanmar dimulai pada 1 Februari 2021. Pihak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi. Akibatnya, terjadi gejolak politik dan ekonomi. PBB memperkirakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat berlipat ganda menjadi 46,3 % dari 24,8 %. Kemiskinan perkotaan diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2022 menjadi 37,2 %, dibandingkan 11,3 % pada 2019 (Laily, 2022).

Myanmar adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang terkenal dengan isu pelanggaran HAM dan juga demokrasi, pemerintahan junta militer yang dikenal dengan sebutan *The State Peace and Development Council* (SPDC). SPDC merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) sejak tanggal 18 September 1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang

saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962 sampai Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai mengambil posisi kepemimpinan di Myanmar dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan perubahan konstitusi baru dibuat pada tahun 2008.

Kudeta yang terjadi 59 tahun yang lalu ini merupakan bagian dari sejarah penting bangsa Myanmar dalam memperjuangkan demokrasi. Berbeda dengan kudeta sebelumnya, alasan utama kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari yang lalu adalah tuduhan kecurangan yang terjadi pada Pemilu yang diselenggarakan November 2020. Hal ini menyebabkan kemarahan dari masyarakat sipil Myanmar dan menuntut agar pihak militer segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih. Kudeta ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan kembalinya kekuasaan pemerintah otoriter dan hilangnya demokrasi. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar, sebab pihak militer nampak enggan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih, terus melakukan penangkapan para tokoh politik nasional, serta bersikap agresif terhadap pergerakan anti-kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil (Nihriroh et al., 2021).

Ketika dalam penguasaannya, kebijakan Kudeta militer tetaplah sama, yakni menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Nilai-nilai demokrasi yang telah diabaikan junta militer tersebut menyebabkan pelanggaran HAM menjadi hal biasa di Myanmar, yang pada akhirnya pihak sipil hanyalah sebagai penonton dan tidak terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris. Demokrasi di Myanmar dapat dianggap sebagai demokrasi yang mengalami kebekuan atau stagnan. Artinya terdapat

penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada (Mirajiah, 2013).

Kudeta adalah bentuk dari intervensi militer dalam masalah politik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta menjadi bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu Negara. masalah pengaruh dari Kudeta Militer ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Myanmar yang terhambat karena adanya campur tangan militer serta hubungan sipil dan militer. Begitu juga dengan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan di dalam negaranya. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga ditandai dengan gejolak, baik dalam berbeberapa segi maupun segi ekonomi iitu sendiri (Rahmi, 2022). Myanmar dikejutkan oleh penggulingan militer atas pemerintah yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari 2021. Dalam dua bulan, konflik tersebut telah merenggut lebih dari 700 nyawa dan berdampak pada keselamatan. dan kesejahteraan (UNDP, 2021).

Bahkan berbagai desakan muncul atas pelanggaran HAM tersebut. Desakan dan ancaman internasional atas Myanmar ini secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan kondisi yang berada di dalam negeri Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) selama 20 tahun lebih telah membuat perekonomian di Myanmar semakin tidak berkembang dan terpuruk (Mirajiah, 2013).

Tabel 1.1
Dampak Pengambilalihan Militer

Sumber Pendapatan	Sektor Yang Berdampak
Upah (remunerasi untuk pekerja)	pertambangan dan penggalian, industri makanan, minuman dan hasil tembakau, industri garmen, industri logam dasar perdagangan, perdagangan eceran, pengangkutan dan penyimpanan. akomodasi, kegiatan keuangan dan asuransi, kegiatan real estat
Pendapatan usaha non pertanian (Pendapatan dari wirausaha non pertanian dan kepemilikan usaha)	pertambangan dan penggalian, industri makanan, minuman dan hasil tembakau, industri garmen, industri logam dasar, perdagangan, perdagangan eceran, pengangkutan dan penyimpanan, Akomodasi, kegiatan keuangan dan asuransi, kegiatan real estat.
Remittance (uang yang diterima dari non-anggota rumah tangga)	Sedikit terpengaruh karena masalah dengan sektor perbankan di Myanmar.
Tanaman/pertanian/produksi air (pendapatan dari: produksi tanaman dan kehutanan, pemeliharaan ternak, perikanan dan budidaya lainnya)	Sedikit terpengaruh karena tantangan yang dialami petani.
Transfer sosial	Agak terpengaruh karena pembangkangan sipil yang sedang berlangsung dan gangguan dalam pelaksanaan beberapa transfer sosial.

Sumber: UNDP, 2021.

Pengucilan Myanmar dari pergaulan dunia dan tekanan internasional pun ternyata berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Pada tahun 2009 *United Nations Development Programme* juga mengeluarkan data pembangunan bagi negara-negara ASEAN. Sebuah penilaian dari lembaga internasional tersebut telah cukup menambah beban panjang bagi Myanmar dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun 2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk dalam kategori tingkat perekonomian atau pendapatan domestik dikawasan Asia Tenggara, khususnya Myanmar yang mengalami pendapatan ekonomi yang rendah, tersebut disebabkan pada umumnya karena adanya ketidakadilan ekonomi oleh penguasa junta militer sebagai kelompok mayoritas etnis Burma (Mirajiah, 2013).

Persoalan ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah berlangsung lama di kalangan etnis minoritas yang mengalami diskriminasi ekonomi. Sebuah kegagalan ekonomi dari kebijakan nasionalisasi yang dijalankan pemerintahan junta militer tahun 1960an juga telah menjadi permasalahan umum di kalangan masyarakat Myanmar (Mirajiah, 2013).

Selain itu juga pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hingga Agustus 2020, Myanmar memiliki tingkat infeksi virus corona terendah di Asia Timur dan wilayah pasifik, meskipun ini mungkin terkait dengan fasilitas pengujian sederhana yang tersedia. Namun, kasus yang tercatat melonjak menjelang kuartal keempat yang memungkinkan sebagian karena peningkatan pengujian. Secara garis besar, rangkaian tindakan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah sejak Februari 2020 berhasil

mengendalikan penyebaran virus tersebut. Namun, mereka juga menyebabkan gangguan dalam operasi bisnis (UNDP, 2021).

Toko-toko ritel serta perusahaan manufaktur menderita gangguan rantai pasokan yang meluas, membuat beberapa bidang ekonomi dan perdagangan hampir terhenti. Selain itu, pada Desember 2020 lebih dari 420.000 migran telah kembali dari luar negeri. Terakhir, dampak ekonomi regional dan global dari COVID-19 telah mengurangi permintaan ekspor Myanmar, memberikan efek lanjutan lebih lanjut pada perekonomian (UNDP, 2021)

Krisis politik yang sedang berlangsung, semakin menambah dampak sosial ekonomi dari pandemi, mengurangi pendapatan. Dalam skenario terburuk, hampir separuh penduduk Myanmar (48,2 persen) akan hidup dalam kemiskinan (dibandingkan dengan 24,8 persen pada tahun 2017), membalikkan pencapaian yang dicapai sejak tahun 2005. Jika situasi di lapangan berlanjut, tingkat kemiskinan dapat dua kali lipat pada awal tahun 2022. Pada saat itu, guncangan krisis akan mengakibatkan hilangnya upah dan pendapatan secara signifikan, terutama dari usaha kecil, dan penurunan akses ke makan (UNDP, 2022c).

Negara Myanmar mendapatkan kejutan pada 1 Februari 2021, ketika militer Myanmar melancarkan kudeta untuk menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis. Pengambilalihan tersebut membuka jalan bagi tindakan keras militer dan polisi terhadap pengunjuk rasa. Dalam kurun waktu dua bulan, lebih dari 700 orang dilaporkan tewas dan ribuan ditahan. Selain itu, ekonomi menghadapi risiko keruntuhan yang signifikan; dalam Pembaruan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik (April 2021), Bank Dunia memproyeksikan kontraksi ekonomi

sebesar 10 persen pada tahun 2021 karena kombinasi dari kehilangan lapangan kerja dan pendapatan yang substansial, bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kerugian pendapatan, stimulus tidak mengimbangi kekurangan output dan publik investasi tidak dipercepat dan ditingkatkan (UNDP, 2022a).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang berkonsentrasi dalam suatu pembangunan dan pertumbuhan memberantas kemiskinan *United Nations Development Programme* Sebagai badan utama PBB untuk pembangunan internasional bekerja di 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan, dan membangun ketahanan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNDP, 2022a)

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). *United Nations Development Programme* (UNDP) UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, pusat kegiatannya di New York untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global.

UNDP didedikasikan untuk agenda reformasi PBB, bekerja sama dengan semua badan-badan PBB untuk mempromosikan Deklarasi Milenium PBB dan

mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, agenda pertama yang umum di dunia adalah untuk pembangunan manusia. Tujuan UNDP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang salah satunya adalah negara Myanmar. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan

United Nations Development Programme terkonsentrasi di tiga area fokus; pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis dan pembangunan perdamaian, serta ketahanan iklim dan bencana. Mandat *United Nations Development Programme* adalah untuk mengakhiri kemiskinan, membangun pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, dan institusi yang inklusif juga mengadvokasi perubahan, dan menghubungkan negara dengan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu orang membangun kehidupan yang lebih baik (UNDP, 2022b)

Sebagai badan utama PBB untuk pembangunan internasional, UNDP bekerja di 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. UNDP membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan, dan membangun ketahanan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. UNDP terkonsentrasi di tiga area fokus; pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis dan pembangunan perdamaian, serta ketahanan iklim dan bencana (UNDP, 2022b).

Melihat krisis ekonomi di negara Myanmar yang disebabkan oleh konflik berkelanjutan juga pandemi covid-19 yang terjadi 2 tahun terakhir peran Aktor

internasional pun sangat penting untuk dilibatkan dalam membantu juga meringankan permasalahan yang terjadi, aktor internasional dalam hal ini adalah organisasi internasional atau dalam hal ini adalah *United Nations Development Programme* yang sesuai dengan tujuan dan mandatnya maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis peran apa yang akan dilakukan oleh *United Nations Development Programme* dalam membantu pemerintah myanmar menanggulangi kemiskinan di negara Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran aktor internasional dalam hal ini adalah UNDP dalam membantu negara Myanmar untuk menanggulangi kemiskinan di negara Myanmar

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa yang dilakukan oleh UNDP sebagai organisasi internasional dalam membantu pemerintah myanmar menanggulangi kemiskinan di negaranya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada berbagai pihak mengenai aktor internasional dan permasalahan ekonomi di negara myanmar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil kajian tersebut dapat menambah pemahaman penulis terkait kerja sama internasional, permasalahan ekonomi dalam hal ini negara myanmar, dan organisasi internasional dalam hal ini adalah *United Nations Development Programme*.

